



## KEBIJAKAN PELAYARAN DAN PERDAGANGAN KERAJAAN SRIWIJAYA

Melani Putri<sup>1</sup> Khoironi<sup>2</sup>, Isrina Siregar<sup>3</sup> Budi Purnomo<sup>4</sup>

[melaniputri495@gmail.com](mailto:melaniputri495@gmail.com)<sup>1</sup> [khoironiani25@gmail.com](mailto:khoironiani25@gmail.com)<sup>2</sup>, [Isrinasiregar@unja.ac.id](mailto:Isrinasiregar@unja.ac.id)<sup>3</sup>

[budipurnomo@unja.ac.id](mailto:budipurnomo@unja.ac.id)<sup>4</sup>

Universitas Jambi<sup>1234</sup>

### Informasi Artikel

#### Kata Kunci :

Kebijakan, Perdagangan,  
Pelayaran, Kerajaan Sriwijaya.

#### Keywords:

Policy, Trade, Shipping, Empire  
Sriwijaya



This is an open access article under the  
[CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Copyright ©2023 by Author.

Published by Universitas Jambi

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan yang diterapkan dalam pelayaran dan perdagangan yang digunakan oleh kerajaan Nusantara khususnya kerajaan Sriwijaya. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi pustaka sebagai sumber untuk memperoleh informasi dari berbagai buku, jurnal yang terkait dengan tema penelitian. Hasilnya, bahwa kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang besar tentunya sangat mengoptimalkan wilayah kekuasaan maritimnya untuk menumbuhkan perekonomiannya. Banyaknya aktivitas perdagangan dan pelayaran yang melintasi wilayah perairan kerajaan sriwijaya membuat kerajaan tersebut membuat beberapa kebijakan yang berguna untuk menjaga keutuhan wilayah kekuasaannya.. Dengan banyaknya kapal-kapal asing yang datang, kerajaan sriwijaya membuat ketetapan mengenai upeti yang diberikan kepada para pedagang asing yang datang, ketetapan lainnya juga mengenai paksaan menimbun barang yang mana kerajaan

sriwijaya memaksa para pelayar dan para pedagang untuk singgah di wilayah Pelabuhan sriwijaya, terakhir dengan banyaknya perompak atau bajak laut yang sering merampas hasil atau barang bawaan pedagang asing, maka pemerintah kerajaan sriwijaya membuat kesepakatan dengan para bajak laut untuk berada dibawah kekuasaannya.

### ABSTRACT

*This research aims to determine the policies implemented in shipping and trade used by the archipelago kingdom, especially the Sriwijaya kingdom. This study uses descriptive qualitative research using literature as a source to obtain information from various books and journals related to the research theme. As a result, the Sriwijaya kingdom as a large maritime empire certainly optimized its maritime territory to grow its economy. The large number of trading and shipping activities that crossed the territorial waters of the Sriwijaya kingdom made the kingdom make several useful policies to maintain the integrity of its territory. With so many foreign ships arriving, the Sriwijaya kingdom made provisions regarding the tribute given to foreign traders who came, other provisions also regarding the compulsion of hoarding goods in which the Sriwijaya kingdom forced sailors and traders to stop at the Sriwijaya Harbor area, finally with the many pirates or pirates who often seized the produce or luggage of foreign traders, the Sriwijaya royal government made an agreement with the pirates sea to be under his dominion.*

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang secara geografis terletak di Asia Tenggara milik nusantara, artinya Indonesia memiliki wilayah perairan lebar Air merupakan sumber daya terpenting bagi manusia dan setiap peradaban di dunia harus didukung

oleh badan air yang membuat tanah sekitarnya subur. Demikian pula laut dan industri perkapalan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan Manusia memiliki banyak aktivitas manusia/komunitas tertentu yang bergantung padanya hidup sebagai pelaut. Dia memiliki nenek moyangnya di Indonesia Mengenal laut dan menjadikan laut sebagai way of life bisa dibuktikan dengan banyaknya kerajaan laut yang berkembang di wilayah pesisir Indonesia masa kini dan kerajaan-kerajaan ini didukung oleh industri perkapalan mereka. Contoh negara/kerajaan maritim di masa lalu yang didukung oleh pelayarannya Negara/Kerajaan Sriwijaya (Asih, 2013).

Sejak abad ke-7, para pelaut Nusantara sudah akrab dengan kelautan. Hal ini disebabkan karena wilayah Nusantara berbentuk kepulauan dan kondisi maritim yang mengelilingi pulau-pulau di wilayah Nusantara. Wilayah yang strategis dimana wilayah Nusantara terletak di dua samudra besar dan dua benua yang menjadikan wilayah Nusantara mustahil untuk tidak dilewati oleh para pelaut (Pradana 2019)

Sejak dahulu, nusantara dikenal sebagai orang-orang pelaut yang menguasai wilayah jalur perdagangan dan jalur pelayaran yang tentunya tidak hanya dikenal di wilayah Nusantara, namun juga posisi Nusantara dikenal sampai ke mancanegara. Sebagai wilayah perairan yang strategis, dipastikan banyak terjadi aktivitas diperairan. Banyak aktivitas yang memungkinkan untuk dilakukan di wilayah perairan misalnya pelayaran, perdagangan ataupun aktivitas kejahatan dalam laut seperti perompakan dan bajak laut. Dengan adanya aktivitas di daerah laut tentunya membutuhkan suatu kebijakan untuk mengatur semuanya agar wilayah kelautan tetap pada jangkauan amannya (Suwandari 2022 : 56)

Seperti yang kita ketahui, bahwa dalam sejarahnya, sudah ada kerajaan-kerajaan Nusantara yang mengenal laut. Kerajaan-kerajaan tersebut yaitu kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Majapahit. Dimana kedua kerajaan tersebutlah yang andai dalam mengarungi lautan. Kedua kerajaan tersebut sama-sama memanfaatkan wilayah kelautannya untuk kedaulatan dan perluasan wilayah kekuasaan mereka. (Budisantoso 2016 : 28)

Perdagangan dan pelayaran sudah menjadi tradisi kuno yang diwariskan sejak zaman kerajaan Sriwijaya. Sebagai kerajaan maritim yang kuat di wilayah Asia Tenggara, Kerajaan Sriwijaya telah memusatkan urusan politiknya yang berfokus pada penguasaan pelayaran dan jalur perdagangan serta berusaha menguasai wilayah-wilayah yang strategis sehingga nantinya akan digunakan sebagaipangkalan kekuatannya di wilayah perairan (Berkah 2017 : 16)

Dikarenakan wilayah kerajaan Sriwijaya sangat luas, dan dapat dikatakan sebagai penguasa lautan, mereka menjadi pusat pelayaran dan perdagangan yang strategis dikarenakan wilayah kekuasaan Sriwijaya dilewati oleh kapal-kapal asing baik itu dari Arab, India, Cina sampai ke Persia Mereka tentunya ingin melakukan kontrak dagang penduduk nusantara ataupun tujuan mereka hanya ingin singgah di nusantara untuk kemudian melanjutkan kembali perjalanannya. Sebagai pusat jalur utama, kerajaan sriwijaya tentunya mendapatkan keuntungan karena memiliki posisi yang strategis dalam jalur pelayaran dan perdagangan. Wilayah yang luas dan jika

wilayah tersebut tidak terkontrol maka akan memunculkan permasalahan. Oleh karena itu kerajaan Sriwijaya tentunya menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi zaman itu (Putri 2019 : 290)

Kemajuan ekonomi Sriwijaya telah terbantu oleh berbagai hal seperti letak geografis yang strategis dan sumber daya alam yang melimpah yang memungkinkan terjadinya perdagangan dengan negara dan bangsa asing. Oleh karena itu tidak heran jika pemerintah Sri Lanka memiliki ekonomi negara Keluar dari ekonomi perkapalan, itu adalah urusan pemerintah Dari sekitar abad ke-7 M hingga sekitar, berada di Nusantara dari hingga Asia di tenggara.

Meskipun Kerajaan Sriwijaya sudah lama memerintah alias tersebar di wilayah yang luas, namun catatan sejarah Kerajaan Sriwijaya masih lemah. Terlihat sisa-sisa Kerajaan Sriwijaya yang agung dengan artefak dan candinya menulis tentang keadaan pada masa Kerajaan Sriwijaya. Ini adalah sisa-sisa Belakangan menjadi salah satu saksi sejarah Kerajaan Sriwijaya. Kajian sejarah Kerajaan Sriwijaya masih terbatas pada aspek politik. Hukum Laut dan Agama. Bahkan juga keadaan perekonomian nasional pada masa Kerajaan Sriwijaya Status Kerajaan Sriwijaya dalam perekonomian internasional juga menjadi persoalan. Hal ini penting untuk diperhatikan karena perekonomian merupakan tulang punggung kehidupan suatu bangsa sebuah negara Atas dasar itulah peneliti melakukan penelitian ini, Tujuannya untuk mengkaji sejarah ekonomi Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-19 secara lebih detail (Santun, 2013)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang mana turut menggunakan ilmu bantu sosial seperti ilmu sosiologi dalam proses pengolahan datanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode pendekatan studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian (Zed, 2008:3).

Sumber yang diperoleh yaitu melalui studi literatur. Sumber-sumber inilah yang nantinya akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas. Selanjanya, penulis menggunakan studi literatur dengan tujuan untuk melengkapi informasi utama. Sumber literatur ini diperoleh melalui berbagai jurnal yang tentunya berkaitan dengan materi yang diangkat. Seteah mendapatkan sumber online, penulis membaca dan mempelajari data yang telah di peroleh untuk kemudian diolah menjadi satu informasi yang utuh (Zed, 2008:3).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Kerajaan Sriwijaya Sebagai Kerajaan Maritim Terbesar Di Nusantara***

Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Hindu yang menjadi kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya ini berdasarkan prasasti Kedukan

Bukit, bahwa pusat pemerintahan kerajaan Sriwijaya terletak di sekitaran sungai Musi yang ada di Palembang, Sumatra Selatan. Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang besar sering kali menjadi tempat lalu lintas perdagangan yang dilewati oleh kapal-kapal dagang dari berbagai penjuru. Kapal-kapal dagang tersebut membawa produknya untuk dipasarkan ke wilayah nusantara sehingga terjadi proses jual beli. Mereka biasanya menjual kain untuk ditukarkan dengan hal lainnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan banyaknya aktivitas dilautan membuat kerajaan Sriwijaya memerlukan suatu pengawasan atau aturan yang akan mengamankan wilayah perairan Sriwijaya. Karena kerajaan Sriwijaya memiliki kunci pelayaran dan perdagangan yang penting untuk negeri-negeri Asia dan Barat yang akan melakukan perdagangan ke belahan dunia lainnya (Purwanti 2016:42).

Penguasaan kerajaan Sriwijaya terhadap wilayah maritim perairannya selain disebabkan karena letak geografisnya yang benar-benar strategis untuk dilewati kapal-kapal dagang, juga disebabkan karena sejarah hubungan berbagai kerajaan yang sudah lama bekerja sama dengan kerajaan Sriwijaya. Dan adanya tuntutan akan permintaan pasar pada saat itu, nyatanya saat itu nusantara menjadi tempat pusat rempah-rempah yang saat itu dibutuhkan oleh beberapa negara, selain itu juga produksi kain tekstil nusantara banyak dibutuhkan, terlahir yaitu mengenai perhiasan emas dan perak yang menarik perhatian kekasaan wilayah lainnya. Kebutuhan akan itu dapat dipenuhi oleh kerajaan Sriwijaya maupun kerajaan lainnya dengan melakukan Kerjasama dengan kerajaan diluar wilayah nusantara pada saat itu. Karena itulah banyak kapal-kapal dagang (Utomo 2010:83).

Kerajaan Sriwijaya yang terkenal dengan wilayahnya yang strategis, karena posisinya berada dijalur pelayaran Selat Malaka, menjadi salah satu pusat tempat transit kapal-kapal asing yang berniat untuk berdagang ataupun hanya benar-benar transit untuk beristirahat dari pelayarannya. Wilayah kekuasaan Sriwijaya yang menyebar luas dan menguasai wilayah-wilayah yang strategis membuat Sriwijaya dapat lebih mudah menyebarkan pengaruh dan membuat kerja sama dengan wilayah lain. Selain menjadi pusat tempay transit kapal-kapal asing, Kerajaan Sriwijaya juga dikenal sebagai tempat penghasil berbagai komoditas (lada, kapur barus, dll) yang dibutuhkan oleh para pedagang yang terutama berasal dari wilayah Cina, India, dan Arab yang tentunya komoditas tersebut diperjual belikan di sekitar pelabuhan (Wolters, 2011:11)

Karena ramainya lalu lintas perdagangan dan pelayaran di wilayah kerajaan Sriwijaya, tentunya kerajaan Sriwijaya banyak mendapatkan keuntungan. Dalam kebijakannya, kerajaan Sriwijaya menetapkan setor pajak bagi kapal-kapal pedagang yang akan memasuki wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya akan meminta atau menarik pajak kepada kapal-kapal yang masuk ke wilayahnya, hal ini memang biasa dilakukan, dan para pedagang yang datang akan langsung memberikan upeti mereka sebagai langkah memasuki wilayah kekuasaan lainnya. Adapun seorang syahbandar yang akan mengontrol wilayah perairan. Sebelum kapal

mendarat di wilayah kerajaan Sriwijaya, kapal-kapal tersebut akan diperiksa terlebih dahulu, jika terdapat sekelompok kapal yang melanggar atau bahkan berusaha meloloskan diri dari pemeriksaan, dan diketahui oleh orang-orang yang menjaga wilayah perairan Sriwijaya, maka mereka akan di giring masuk ke perairan sempit untuk diamankan atau bahkan bisa jadi mereka akan di eksekusi (Sholeh, 2015:15)

Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang sangat luas sehingga untuk menghindari kerugian dari pihak kerajaan Sriwijaya, mereka memiliki pasukan armada laut yang tentunya sudah terlatih, sehingga para para pelayar yang membawa barang dagangannya ke wilayah kerajaan Sriwijaya akan aman dari para bajak laut dan perompak. Pasukan armada laut kerajaan Sriwijaya diambil dari orang-orang laut atau orang-orang yang tinggal di wilayah kekuasaannya Sriwijaya. Dalam sejarahnya, sebenarnya orang-orang laut itu merupakan bajak laut. Namun karena pihak kerajaan Sriwijaya melakukan perjanjian dengan orang-orang tersebut dengan imbalan yang sudah ditentukan, akhirnya setelah melakukan perjanjian para bajak laut tersebut melaksanakan perintahnya untuk mengamankan wilayah perairan. Orang-orang laut ini pada masa sebelumnya dikenal dengan bajak laut yang terkenal dengan kekejamannya, namun Sriwijaya mampu berhubungan baik dengan mereka. Sebelum adanya perjanjian atau negosiasi dari pihak kerajaan dengan para bajak laut, para bajak laut selalu merampas dan menjarah para pelaut yang melewati wilayah kekuasaan Sriwijaya sehingga para pelayar dan pedagang merasa dirugikan, maka dari itulah kesepakatan terjadi diantara pihak kerajaan dengan para bajak laut, meskipun tidak semuanya (Berkah 2017:51).

Pasukan armada laut kerajaan Sriwijaya ditempatkan di berbagai titik pangkalan strategis, terutama selat Malaka yang tentunya mendapat tugas mengawasi, melindungi kapal-kapal dagang asing yang berlabuh di wilayah kelautan Sriwijaya, memungut biaya cukai kepada para pedagang, serta mencegah terjadinya pelanggaran laut di wilayah kekuasaannya. Seperti yang kita ketahui bahwa kerajaan Sriwijaya memiliki wilayah yang luas, maka Kerajaan Sriwijaya dalam menjamin keamanan wilayah kekuasaannya dari serangan musuh ataupun para perompak, mereka memerintah kepada bawahannya untuk membangun pos-pos pejagaan untuk keamanan di wilayah yang memungkinkan terjadinya permasalahan (Wolters, 2011:34)

Para pedagang yang menggunakan kapalkapal yang melalui Selat Malaka singgah di pelabuhan kerajaan Sriwijaya dalam kepentingan mengambil perbekalan oleh karena Kerajaan Sriwijaya harus berusaha juga memperoleh monopoli tersebut maka haruslah mengua sai daerah pesisir lainnya. Adanya kewajiban kapal-kapal tersebut berlabuh di Sriwijaya untuk keperluan perbekalan adalah suatu politik Sriwijaya agar mendapatkan keuntungan. Perdagangan di Sriwijaya tidak hanya dilakukan oleh rakyat biasa akan tetapi penguasa Kerajaan Sriwijaya juga ikut serta dalam kegiatan perdagangan terbukti Sriwijaya mempunyai kapal kapal sendiri (Saputra 2014:3).

Kerajaan Sriwijaya mungkin telah memerintah antara abad ke-7 dan ke-14 Masehi. Sriwijaya dengan kehebatan militernya mampu menguasai perdagangan di kawasan Selat Malaka yang kemudian menjadi penghubung antara Cina dan India. Sriwijaya juga berperan aktif dalam perdagangan rempah-rempah atau produk pertanian antarnegara seperti kapur barus, lada dan rempah-rempah lainnya. Selain ikut serta dalam perdagangan, Sriwijaya juga bertugas menjaga jalur perdagangan bebas para perompak. Meskipun Kerajaan Sriwijaya sudah lama memerintah dan juga dikenal luas wilayahnya, namun sejarah tertulis tentang Kerajaan Sriwijaya masih sedikit. Dipajang peninggalan-peninggalan kejayaan Kerajaan Sriwijaya, mulai dari artefak hingga candi yang mendokumentasikan keadaan Kerajaan Sriwijaya. Peninggalan ini kemudian menjadi salah satu bukti sejarah Kerajaan Sriwijaya (Pradhani, 2017).

Majapahit terbuka dengan wilayahnya kekuasaannya tetapi pada saat yang sama ia bersikap tegas. Ketika pejabat Majapahit seperti gubernur, adipati, atau menteri dikirim ke daerah taklukan, itu untuk meningkatkan kekuatan Majapahit dan mengumpulkan hadiah dari daerah itu. Majapahit juga memiliki sikap yang tegas terhadap pengaruh asing. Sikap keras Majapahit tercermin dari kekuatan angkatan laut dan tentara kerajaan untuk melakukan ekspedisi, pengawasan dan tindakan terhadap negara-negara asing yang ingin mencampuri situasi internal Kerajaan Majapahit. (Widodo Putro :2017).

Untuk menjamin keamanan di wilayahnya, dibagian Barat Kalimantan pada tahun 1369 Masehi dikacaukan oleh bajak laut dari Sulu, Filipina, yang dibantu oleh Tiongkok, segera para armada Majapahit muncul di lautan Tiongkok Selatan, sehingga daerah tersebut terhindar dari pengacau. Pada tahun 1370 Masehi, tiga orang raja di Nusantara berusaha melepaskan diri dari Majapahit dan mengirimkan utusan sendiri ke Tiongkok, akibatnya Majapahit mengirimkan armada dan pada tahun 1377 raja-raja tersebut dibinasakan. Efektivitas penguasaan Majapahit terhadap wilayah maritimnya tidak dapat dilepaskan dari duo kepemimpinan raja dan patihnya, Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Pada saat kepemimpinan Hayam Wuruk, kepastian hukum menjadi pilar yang penting dalam kehidupan kerajaan. Hal tersebut dibuktikan dengan dituliskannya kitab undang-undang Negarakertagama yang mengatur tentang kehidupan kerajaan Majapahit dan untuk menjaga wibawa kerajaan, Majapahit membentuk pengadilan bernama Saptopati (Wulansari :2012).

Negara kertagama merupakan hukum tertulis Kerajaan Majapahit yang mengatur jalannya roda pemerintahan negara dan kehidupan rakyat Majapahit. Gajah Mada mengeluarkan karya yang menyangkut hukum adat antara lain ketika ia menjadi Bekel Bhayangkara para pemuda dibagi dalam dua golongan, yaitu darmaputera dan bhayangkara. Darmaputera adalah golongan pemuda yang bertugas sebagai penjaga pusat kedudukan pemerintahan dan mahkota, sedangkan bhayangkara adalah golongan pemuda yang bertugas sebagai penjaga keamanan dan kehormatan negara (Gumilang, :2013)

Disaat menjabat sebagai Mangkubumi pada masa Raja Hayam Wuruk, tugas kenegaraan diatur dalam beberapa instansi sebagai berikut: Sang Prabu ialah ketua sidang mahkota yang mengurus semua urusan rumah tangga keraton dan anggota keluarga Prabu, kemudian mengatur soal perkawinan, peralihan mahkota, kedudukan mahkota, dan ketentaraan negara; Sang Prabu memerintahkan negara dengan empat badan pemerintahan yang terdiri dari Mantri Katrini atau Maha Meteri yang tiga, yaitu Manteri Hino, Manteri Sirikan, dan Manteri Halu; Panca Ring Wilwatikta adalah lima serangkai Majapahit yang merupakan departemen-departemen yang terdiri dari empat rakyas dan seorang mahapatih. Bidang pemerintahan umum dipimpin oleh Gajah Mada dan isu-isu terkait politik negara dibahas dan dilaksanakan oleh Panca Ring Wilwatikta dan Mantri Katrini; Dharmajaksa adalah jabatan keagamaan yang terdiri dari pemimpin agama Buddha dan pemimpin agama Siwa; dan Sapta Papatti atau Upapatti yang terdiri dari Pamegat Agama Siwa dan dua orang pemuka agama Buddha bernama Kandangan Atuha dan Kandangan Langka. Bisnis Anda adalah masalah agama dan spiritual (Hadikusuma, 1978: 25-26).

Eksplorasi sumber daya alam di laut Indonesia selain dapat meningkatkan pendapatan masyarakat juga dapat merusak lingkungan. Pencemaran lingkungan pesisir dan laut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pembuangan limbah di darat maupun di lautan. Kegiatan ekonomi darat yang dapat merusak dan mencemari lingkungan pesisir dan laut antara lain penggundulan hutan, pembuangan limbah industri, limbah pertanian, limbah domestik dan limbah padat, konversi kawasan mangrove dan padang lamun, serta rehabilitasi pesisir. Sementara itu, kegiatan di laut yang dapat mencemari lingkungan pesisir dan laut, antara lain pelayaran, pembuangan sampah laut, pertambangan, eksplorasi dan eksploitasi minyak, budidaya laut dan perikanan. (Sutisna. 2012).

Di samping kerusakan lingkungan, dampak perubahan iklim terjadi secara perlahan dalam jangka waktu yang cukup panjang, antara 50-100 tahun yang berkontribusi terhadap perubahan permukaan air. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, akibat perubahan iklim daerah pesisir pulau kecil yang akan tenggelam 100 tahun lagi meliputi daerah seluas 475,905 hektar atau rata-rata kehilangan lahan/pulau sebesar 4,76 hektar per tahun. Perubahan iklim akan membawa bencana bagi 41 juta orang Indonesia yang tinggal di daerah pesisir dengan ketinggian 10 meter dpl (Sulistiono 2013).

### ***Kebijakan Kerajaan Maritim***

Kebijakan lainnya yaitu dimana kerajaan Sriwijaya menerapkan kebijakan untuk membayar uang upeti kepada para pedagang yang datang. Artinya, selain kerajaan sriwijaya mencoba memberikan kenyamanan untuk para pelayar dan para pedagang yang akan melintasi atau datang kewilayah nusantara yang mana mereka tidak akan diganggu oleh para perompak atau bajak laut, dan setelah sampai ke wilayah nusantara, mereka akan diperintahkan untyuk membayar upeti. Disini

Kerajaan Sriwijaya mewajibkan kepada para pedagang asing yang melintas perairan milik wilayah Sriwijaya baik itu untuk singgah atau berdagang di pelabuhan-pelabuhan milik Sriwijaya, untuk dikenakan wajib membayar uang upeti kepada kerajaan Sriwijaya sebagai penguasa di jalur pelayaran yang mereka singgahi. Upeti tersebut nantinya akan diserahkan kepada sang Raja (Budisantoso 2016:11).

Pemberian upeti kepada para pedagang atau orang-orang yang melintasi wilayah kekuasaan sriwijaya hanya diterapkan di Pelabuhan-pelabuhan yang menjadi pusat kerajaan sriwijaya yang berada di Palembang. Sedangkan Pelabuhan-pelabuhan lainnya seperti Pelabuhan subregional dan Pelabuhan-pelabuhan kecil hanya ditugaskan untuk menyediakan konsumsi. Pelabuhan yang didalamnya terdapat aktivitas perdagangan atau lainnya, tetap dikenakan membayar upeti kepada penguasa Sriwijaya. Tentunya disetiap Pelabuhan terdapat penjaga atau syahbandar yang diberikan tugas untuk menjaga dan mengelola Pelabuhan dari adanya kegiatan perdagangan atau kekacauan yang akan memunculkan suatu ancaman. Untuk itu, pelabuhan-pelabuhan kecil pun sangat berperan penting dalam menjaga kekuasaan wilayah kekuasaan Sriwijaya. Selain menjaga pelabuhan, para pedagang lokal juga diperintahkan untuk mengirim dagangannya ke pelabuhan-pelabuhan lainnya dan melakukan kerjasama atau diplomasi dengan tujuan memperkuat jaringan perdagangan global (Putri 2019:14).

Selain adanya syahbandar, ada juga yang bernama Laksamana Angkatan laut struktur pemerintahan pada kerajaan Sriwijaya. Laksamana Angkatan laut ini memiliki tugas yang strategis yang tentunya posisinya berada dibawah langsung penguasa, dan setara dengan mangkubumi atau patih. Tugasnya yaitu menjaga keamanan dan keutuhan wilayah Kerajaan Sriwijaya dibidang perdagangan (Achadiati, 1988: 15-16).

Salah satu wilayah perairan Kerajaan Maritim yang strategis yaitu wilayah perairan Selat Bangka dan sekitarnya, Selat Malaka dan sekitarnya, dan jalur pelayaran disepanjang wilayah perairan pesisir pantai timur Sumatra. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang berhasil mendominasi wilayah Selat yang memegang kunci perdagangan dan pelayaran pada saat itu. Bagi Sriwijaya wilayah perairan Pulau Bangka sangat penting untuk dijadikan wilayah kekuasaannya. Di Jalur perdagangan Selat Bangka banyak para pelaut yang mempunyai tujuan tidak baik. Mereka melakukan perampokan kepada para pedagang yang ingin menuju ke wilayah Sriwijaya. Para perampok ini menyebar hampir diseluruh perairan. Karena wilayah yang strategis dan banyak para perampok yang menjarah para pelayar dan pedagang di lautan yang tujuannya mengarah kewilayah Sriwijaya, maka Sriwijaya memperkuat armada lautnya dengan melakukan pelatihan khusus. Dalam melaksanakan pelatihan, yang dilakukan ialah melatih ketangguhan dan kepintaran dalam berhan hidup dilautan sbagai dasar untuk bertahan hidup di dalam pelayar laut lepas. Tentunya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pasukan ini



nantina yang akan dipekerjakan sebagai armada laut sriwijaya yang bertugas untuk menangkap para perampok atau bajak laut (Annisa 2016:3-6).

Kebijakan lainnya yaitu, di dalam kerajaan sriwijaya, mereka menerapkan hukum adat yang disebut “paksaan menimbul barang”. Dimana ini merupakan kebijakan yang secara tidak langsung mewajibkan semua kapal-kapal asing yang melewati wilayah kekuasaan sriwijaya untuk singgah di Pelabuhan Kerajaan Sriwijaya. Padahal belum tentu semua kapal-kapal yang melewati perairan kekuasaan tidak ingin singgah atau memasuki wilayah darat atau Pelabuhan sriwijaya, namun karena adanya ketentuan seperti itu, akhirnya mereka datang ke wilayah Kerajaan Sriwijaya. Dengan banyaknya kapal-kapal yang singgah di Pelabuhan Sriwijaya membuat perekonomian kerajaan sriwijaya meningkat karenanya banyaknya interaksi perdagangan di wilayahnya yang berakibat pada bea cukai yang nantinya akan disetorkan kepada raja (Soekmono, 2002:10).

Kegiatan perekonomian dan perdagangan sriwijaya: (1) Penguasa, Kerajaan Sriwijaya memerintah gerbang yang berdekatan di sungai-sungai besar hal ini mungkin terjadi Periksa pergerakan area pedalaman hingga wilayah pesisir dandan sebaliknya; (2). diproduksi oleh Kerajaan Sriwijaya dengan fokus pada kehutanan, pertanian dan pertambangan dalam negeri untuk membawa kemakmuran ke kerajaan; (3). pelaut yang terkadang mandiri, yang melindungi wilayah kerajaan di bawah Par Bajak laut jahat menduduki kapal armada pedagang dan dalam kasus kerajaan Membentuk armada yang terorganisirnya (DickLue 2008, 88).

Hubungan ini biasanya meliputi Orang-orang dari budaya yang berbeda, etnis dan Loyalitas tidak hanya terhubung perjanjian resmi di bawah sumpah, tetapi juga dengan objek yang berbeda rampasan perdagangan luar negeri saling menguntungkan. Produsen membawa barang-barang mereka dari pertanian, Hutan dan pertambangan di pedalaman ke pusat-pusat kegiatan daerah Kerajaan Sriwijaya yang palsu sungai besar dengan Laut. dari pusat Kerajaan Sriwijaya Pelaut melakukan bisnis dengan kontrak jangka panjang Penguasa atau orang yang dipekerjakan oleh kerajaan pelaut itu mengirim barang Dari pelabuhan Sriwijaya untuk pedagang Cina, Arab, dan India. Karena daerah Kerajaan Sriwijaya dianggap gudang pengangkutan barang Arab, India dalam bahasa Cina. selama masa pemerintahan Sriwijaya memiliki beberapa kota besar, Salah satu kota tersebut adalah Keda Semenanjung Malaysia, Pantai Barus Sumatera Barat, Sumatera, Jambi dan Palembang di pantai timur laut Sumatera. Kelahiran Kota Ini sebagian karena memang begitu (Utomo 2010, 86).

## **KESIMPULAN**

Sejak dahulu, nusantara dikenal sebagai orang-orang pelaut yang menguasai wilayah jalur perdagangan dan jalur pelayaran yang tentunya tidak hanya dikenal di wilayah Nusantara, namun juga posisi Nusantara dikenal sampai ke mancanegara. Orang-orang pelaut nusantara dikenal juga dalam sejarahnya sejak zaman kerajaan

Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang besar menjadi tempat lalu lintas perdagangan yang dilewati oleh kapal-kapal dagang dari berbagai penjuru. Kapal-kapal dagang tersebut membawa produknya untuk dipasarkan ke wilayah nusantara sehingga memunculkan proses perdagangan dan pelayaran yang tentunya wilayah kerajaan Sriwijaya banyak disinggahi oleh pedagang-pedagang asing.

Karena ramainya lalu lintas perdagangan dan pelayaran di wilayah kerajaan Sriwijaya, tentunya kerajaan Sriwijaya banyak mendapatkan keuntungan. Dalam kebijakannya, kerajaan Sriwijaya menetapkan setor pajak atau bea cukai bagi kapal-kapal pedagang yang akan memasuki wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya, bea cukai ini diberikan kepada mereka yang datang ke wilayah Pelabuhan dan melakukan proses berdagang dengan masyarakat setempat. Mengenai pemberian upeti ini, upeti akan dikirimkan kepada raja melalui syahbandar yang ada di mengurus pelabuhan setempat. Kerajaan Sriwijaya seperti menetapkan kebijakan paksaan menimbun barang yang mana kerajaan Sriwijaya memaksa para pedagang atau pelayaran asing yang melintasi wilayah perairannya untuk singgah ke pelabuhannya, hal itu ditujukan agar kerajaan Sriwijaya banyak mendapat upeti dari para pedagang asing tersebut. Kerajaan Sriwijaya juga melakukan Kerjasama dengan para bajak laut untuk mereka dijadikan sebagai armada pasukan maritimnya, dimana mereka ditugaskan untuk menjaga wilayah perairan kerajaan Sriwijaya.

Wilayah perairan memegang peran penting sebagai penggerak sejarah di Indonesia. Sejarah maritim yang terkait dengan perairan tidak hanya terbatas pada insiden-insiden yang terjadi di laut, tapi juga di sungai-sungai. Sungai-sungai menjadi jalur penghubung antara wilayah pedalaman dan pesisir dalam pelayaran dan perdagangan. Konsep bentang air (*waterscape*) menjadi gambaran bahwa sungai-sungai merupakan bagian penting dari sejarah maritim yang terintegrasi dengan laut. Banyak karya yang mengangkat sungai sebagai fokus pembahasan sehingga pandangan terhadap perairan semakin kompleks.

Laut yang pada awalnya merupakan milik bersama akhirnya menjadi ruang yang diperebutkan karena memiliki nilai ekonomis. Perairan laut dan sungai sekarang bukan hanya jalur pelayaran dan perdagangan, tetapi juga sebagai tempat eksploitasi sumber daya alam. Kebijakan-kebijakan baru terkait laut mempengaruhi pandangan manusia terhadap laut. Hal ini berdampak pada arah penulisan sejarah maritim yang mengikuti perkembangan peristiwa. Historiografi Indonesia tidak lagi didominasi oleh aktivitas perdagangan dan pelayaran antar-etnik maritim di Nusantara, melainkan perseteruan antarbangsa terkait konflik perbatasan (*dispute*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Achadiati, Y. (2019). *Sejarah Peradaban Manusia "Zaman Sriwijaya"*. Jakarta: P.T Gita Karya.
- Achadiati S, Soeroso M.P., (1988). *Sejarah Peradaban Manusia: Zaman Majapahit*. Jakarta: PT Gita Karya.

- Annisa, F. (2016). *Kerajaan-Kerajaan Dan Pelabuhan Besar Di Nusantara*. Universitas Islam Negerisunan Gunung Djati, 3-6
- Berkah, A. (2017). *Dampak Kekuasaan Maritim Sriwijaya Terhadap Masuknya Pedagang Muslim di Palembang Abad VII-IX Masehi*. Jurnal Medina-Te, Volume.16, Nomor 1.
- Berkah, A. (2017). Dampak Kekuasaan Maritim Sriwijaya Terhadap Masuknya Pedagang Muslim di Palembang Abad VII-IX Masehi. *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, 13(1), 51–60. <https://doi.org/10.19109/medinate.v13i1.1537>
- Burhaduddin, S., dkk (2003). *Sejarah Maritim Indonesia: Menelusuri Jiwa Bahaari Bangs Indoneisa dalam proses Intergrasi Bangsa (Sejak Jaman Prasejarah Hingga Abad XVII)*
- Budisantoso, H. (2016). *Sriwijaya Kerajaan Meritim Terbesar Pertama diNusantara*. Volume 11
- Dick-Read, Robert. 2008. *Penjelajahan Bahari "Pengaruh Peradaban Nusantara di Afrika".(Terjemahan)*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Eka Asih. (2013). *Studi Kewilayahan dalam Penelitian Peradaban Sriwijaya*. Kalpataru Majalah Arkeologi. Vol. 22(2).
- Malasari, NN. *Bajak Laut dan Hukum : Dua Sisi Mata Uang dalam Kejayaan Kerajaan Sriwijaya*. Academia
- Panmaritim. (2022). *Kerajaan Sriwijaya sebagai Kerajaan Maritim di Indonesia*. Diakses melalui <https://panmaritim.com/kerajaan-sriwijaya-sebagai-kerajaan-maritim-di-indonesia/>
- Pradhani, SI. (2017). *Sejarah Hukum Maritim Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dalam Hukum Indonesia Kini*.
- Poesponegoro, MD., dan Djoened, M. *Sejarah Nasional Indonesia*. Balai Pustaka
- Pradana, M. dkk. 2019. *Aktivitas Pelayaran Dan Perdagangan Di Pelabuhan Surabaya Tahun 1800–1830*. Universitas Airlangga.
- Putri, RH. (2019). *Sriwijaya dalam Perdagangan Dunia*. Diakses melalui <https://historia.id/kuno/articles/sriwijaya-dalam-perdagangan-dunia-DEnEj>
- Pradhani, S. I. (2017). Sejarah Hukum Maritim Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dalam Hukum Indonesia Kini. *Lembaran Sejarah*, 13(2), 186–203. <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.33542>
- Purwanti, Retno. (2016). *Jurnal Siddhayatra*,76(Vol. 21 No. 2. 2016). Balai Arkeologi Sumatera Selatan: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Arkeologi Sumatera Selatan.
- Santun, D. I. M. (2013). *Simbol Kejayaan Ibukota Sriwijaya dalam Tiga Prasasti Sriwijaya di Palembang ( The Glory of Srivijaya ' s Capital City Symbolized in Three Srivijaya Inscriptions in Palembang )*. Mozaik, 13(2), 136–148
- Sholeh, Kabib. (2019). Jalur Pelayaranp Perdagangan Kuno di Selat Bangka Sebagai Letak Strategi Berkembangnya Kekuasaan Maritim Sriwijaya Abad VII-VIII Masehi. Sindang: *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah*. Vol. 1, No.1

- Soekmono. (2002). *Pengantar Kebudayaan Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius
- Sholeh, K. (2015). Jalur Pelayaran dan Perdagangan Sriwijaya Pada Abad ke-7 Masehi. *Jurnal Siddhayatra* Vol. 22 (2)
- Suswandari, dkk. (2022). Menelisik Sejarah Perekonomian Kerajaan Sriwijaya Abad VII-XIII. *Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*
- Sulistiono ST, Rochwulaningsih Y. (2013). Contest for Hegemony: The Dynamics of Inland and Maritime Cultures Relations in the History of Java Island, Indonesia. *Journal of Marine and Island Cultures* 2(2): 115–127.
- Sutisna DH. (2012). Potensi Ekonomi Kelautan Mampu Menyejahterakan Rakyat Indonesia. <http://www.dekin.kkp.go.id/?q=news&id=20120802100908355974768552433825750659740299>. Diakses 6 Oktober 2014.
- Saputra, A., Sair, A., & Supriyanto, S. (2014). Kerjasama Kerajaan Sriwijaya dengan Dinasti Tang pada Tahun 683-740 M. Criksetra: *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 3(2)
- Utomo, Bambang Budi. (2010). *Ekspedisi Sriwijaya Mencari Jalur yang Hilang*.
- Wolters, O.W. (2011). *Kemaharajaan Maritim Sriwijaya dan Perniagaan Dunia Abad III –Abad VII*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.